

Analisis Implementasi Kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Sidoarjo

Fajar Muharram^{1*}, Siti Cholifah¹, Purnama Julia Utami²

¹Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia

²Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

*fajarmuharram@umsida.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Integrated Stunting Reduction Acceleration Program policy in Sidoarjo Regency using a qualitative descriptive approach. The research employs Policy Implementation theory, which encompasses communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The qualitative research method used is descriptive, with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that policy communication has been effectively conducted, although significant challenges remain at the village level, particularly regarding public understanding and participation. Human and non-human resources are considered adequate; however, their distribution remains uneven and requires improvement to achieve optimal effectiveness. The implementers' disposition shows a high level of commitment to the program, but transparency in policy implementation remains a challenge to be addressed. The bureaucratic structure has supported coordination among stakeholders, although some procedures are perceived as overly complex and need simplification to improve implementation efficiency. The implementation of the Integrated Stunting Reduction Acceleration Program in Sidoarjo Regency reflects the local government's strong commitment to addressing nutritional challenges through a holistic approach. This program targets a reduction in the stunting rate to 14% by 2024, employing various measures such as the Bangga Kencana Consolidation, Convergence of Stunting Reduction Acceleration, and intensive public awareness campaigns. Regular evaluations have shown positive results, including a significant decrease in the stunting rate from 16.1% in 2022 to 8.4% in 2023. By integrating relevant sectors and actively involving the community, this strategy has proven effective in creating an environment that supports optimal child growth. With improvements in these three aspects, the effectiveness of policy implementation is expected to increase, enabling the program to have a more significant impact on reducing stunting rates in Sidoarjo Regency.

Keywords: Policies; Stunting; Work Programs

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Sidoarjo melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan telah dilakukan secara efektif, tetapi masih terdapat tantangan signifikan di tingkat desa, terutama terkait pemahaman dan partisipasi masyarakat. Sumber daya manusia dan non-manusia dianggap memadai, meskipun distribusinya belum merata dan memerlukan perbaikan untuk mencapai efektivitas

optimal. Disposisi implementor memperlihatkan komitmen yang tinggi terhadap program ini, tetapi transparansi dalam pelaksanaan kebijakan masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Struktur birokrasi telah mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan, meskipun beberapa prosedur dianggap terlalu rumit dan membutuhkan penyederhanaan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan. Berdasarkan temuan ini, penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan upaya peningkatan dalam aspek komunikasi kebijakan, penguatan kapasitas sumber daya, dan reformasi birokrasi Implementasi kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Sidoarjo mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan gizi melalui pendekatan holistik. Program ini menargetkan penurunan angka stunting hingga 14% pada tahun 2024, dengan berbagai langkah seperti Konsolidasi Bangga Kencana, Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting, dan sosialisasi intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Evaluasi berkala menunjukkan hasil positif, termasuk penurunan signifikan angka stunting dari 16,1% pada 2022 menjadi 8,4% pada 2023. Dengan mengintegrasikan sektor-sektor terkait dan melibatkan masyarakat secara aktif, strategi ini terbukti efektif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak secara optimal. Dengan perbaikan pada ketiga aspek tersebut, diharapkan efektivitas implementasi kebijakan dapat ditingkatkan sehingga program ini mampu memberikan dampak yang lebih besar dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo.

Kata Kunci: Kebijakan; Stunting; Program Kerja

Pendahuluan

Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami pertumbuhan yang terganggu sehingga tinggi badannya lebih rendah dari standar usianya. Ini biasanya diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis pada masa awal kehidupan, terutama dalam seribu hari pertama sejak konsepsi hingga anak berusia dua tahun. Stunting dapat memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan, perkembangan kognitif, dan produktivitas seseorang di masa depan (Abdussamad & Hurudji, 2022). BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) mengemas kampanye dengan pesan hindari empat terlalu terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak jumlah anak, bertujuan untuk mengendalikan masalah kependudukan dan mengurangi prevalensi stunting.

Kementerian Kominfo dan BKKBN bekerja sama untuk mewujudkan target penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024, memanfaatkan kearifan lokal dan kolaborasi antar pemerintah untuk meningkatkan nutrisi dan gizi masyarakat (Anita et al., 2024). Pemerintah Indonesia menargetkan angka stunting turun menjadi 14% di tahun 2024, dengan Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala BKKBN, Dr. Hasto Wardoyo, sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting, menunjukkan perhatian serius pemerintah dalam mempersiapkan generasi emas 2045 (Arini et al., 2020). Kampanye presiden yang menangani isu stunting telah menjadi fokus utama dengan berbagai program dan strategi yang diusulkan untuk mencegah dan mengurangi prevalensi stunting di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menekankan pentingnya pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak. Upaya ini dilakukan melalui percepatan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh keluarga, serta peningkatan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak (Darmansyah & Yusran, 2024). Dalam RPJMN 2020-2024, percepatan penurunan stunting menjadi salah satu proyek prioritas, termasuk dalam Major Project yang mencakup percepatan penurunan kematian ibu dan stunting. Fokus ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia sejak dini (Purwati et al., 2024).

Kebijakan stunting menurut Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mencakup berbagai strategi dan target yang dirancang untuk menurunkan prevalensi stunting di Indonesia. RPJMN 2020-2024 menetapkan target ambisius untuk mengurangi prevalensi stunting balita dari 24,4% pada 2021 menjadi 14% pada 2024 (Nuriadi et al., 2022). Strategi nasional percepatan penurunan stunting mencakup peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di berbagai level pemerintahan, mulai dari kementerian hingga desa. Kebijakan ini juga memfokuskan pada intervensi lintas sektor, melibatkan berbagai departemen dan lembaga untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang bergizi seimbang dan aman (Mamulaty et al., 2024). Anggaran yang disediakan untuk program penurunan stunting mencapai 34,14 triliun rupiah, dengan 23,74 triliun rupiah yang di-tagging secara spesifik untuk stunting, menunjukkan prioritas yang tinggi dari pemerintah (Krosby et al., 2024). Pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjanjikan program Kartu Anak Sehat untuk melengkapi fasilitas kesehatan masyarakat dalam upaya mencegah stunting. Selain itu, calon presiden Ganjar Pranowo menekankan pentingnya program dukungan kesehatan bagi ibu hamil dan kualitas kandungan untuk mencegah stunting. Kebijakan ini mencerminkan upaya holistik pemerintah dalam menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak di Indonesia (Ardhana & Hertati, 2021).

Langkah-langkah konkret yang diambil dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk mengurangi stunting di Indonesia meliputi berbagai strategi dan tindakan yang terinci (Larasati & Susilo, 2024). Pertama, RPJMN menetapkan target ambisius untuk menurunkan prevalensi stunting balita dari 24,4% pada 2021 menjadi 14% pada 2024. Strategi nasional percepatan penurunan stunting mencakup peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di berbagai level pemerintahan, termasuk kementerian, provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Kebijakan ini memfokuskan pada intervensi lintas sektor, melibatkan berbagai departemen dan lembaga untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang bergizi seimbang dan aman (Maulana & Santosa, 2023). Anggaran yang dialokasikan untuk program penurunan stunting mencapai 34,14 triliun rupiah, dengan 23,74 triliun rupiah yang di-tagging secara spesifik untuk stunting, menunjukkan prioritas tinggi dari pemerintah. Selain itu, pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjanjikan program Kartu Anak Sehat untuk melengkapi fasilitas kesehatan masyarakat dalam upaya mencegah stunting, sementara calon presiden Ganjar Pranowo menekankan pentingnya dukungan kesehatan bagi ibu hamil dan kualitas kandungan. Strategi lainnya mencakup pengembangan aksi lintas sektor untuk memperbaiki konsumsi gizi keluarga, pengembangan aksi di tingkat keluarga untuk fokus pada keluarga berisiko stunting, dan pengembangan aksi di tingkat desa, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang.

Koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi kunci, dengan semua intervensi yang dilakukan berfokus pada pencapaian target yang telah ditetapkan. Dengan langkah-langkah konkret ini, pemerintah berharap dapat secara signifikan menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak di Indonesia (Iqbal, 2022). Sebagai respons terhadap Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan beberapa kebijakan lokal untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Kebijakan ini meliputi Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (No. 89 Tahun 2021) dan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Peran Desa dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (No. 90 Tahun 2021) (Mitra et al., 2022).

Data terbaru mengenai stunting di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan perkembangan yang menggembirakan pada tahun 2023. Pada awal Februari tahun itu, angka stunting mencapai 5,3%, dengan 4.986 balita terindikasi mengalami kondisi tersebut. Namun, melalui upaya yang gigih dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, angka stunting berhasil dikurangi menjadi 3,4% pada bulan Agustus 2023, meskipun jumlah balita yang terkena stunting sedikit meningkat menjadi 5.026. Berdasarkan Data Sistem Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, kasus stunting di Kabupaten Sidoarjo turun menjadi 3,4%. Hal ini menunjukkan efektivitas dari berbagai program intervensi yang dilakukan, seperti peningkatan akses terhadap gizi yang memadai dan edukasi mengenai pola makan sehat bagi masyarakat.

Meskipun demikian, lonjakan jumlah balita yang terindikasi stunting menunjukkan bahwa tantangan dalam menangani masalah gizi buruk masih ada. Namun, pencapaian menurunkan prevalensi stunting menjadi 3,4% menegaskan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak, serta peran penting kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait lainnya dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu, SK Bupati Sidoarjo tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sidoarjo Periode 2022-2024 (No. 188/197/438.1.13/2022) dan SK Bupati Sidoarjo tentang Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Sidoarjo (No. 188/357/438.1.13/2022) juga telah dikeluarkan untuk memastikan koordinasi dan efektivitas program ini.

Melalui program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi, Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk mengurangi prevalensi stunting dengan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kabupaten dan desa untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan efektif dalam implementasi kebijakan meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak di Sidoarjo. Implementasi kebijakan adalah proses penerapan dan pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pihak yang berwenang, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Proses ini melibatkan berbagai kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata yang berdampak pada masyarakat. Implementasi kebijakan memerlukan koordinasi dan kerjasama antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga, organisasi, dan masyarakat, serta melibatkan penggunaan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada beberapa faktor kunci seperti komunikasi yang jelas, ketersediaan sumber daya yang memadai, komitmen dan karakteristik pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi yang mendukung (Affrian et al., 2024). Dari adanya kondisi penelitian saat ini ditemukan mengenai komunikasi kebijakan dilakukan dan seberapa efektif informasi mengenai kebijakan sampai kepada kelompok sasaran. Selain itu, akan dianalisis disposisi implementor, termasuk sikap dan komitmen mereka terhadap kebijakan. Ketersediaan dan distribusi sumber daya, baik manusia maupun non-manusia, juga akan dievaluasi untuk mengetahui dampaknya terhadap pelaksanaan program. Struktur birokrasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan juga akan dikaji untuk mengidentifikasi potensi kendala atau dukungan yang diberikan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Cirebon, serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan (Hermawan & Pusparani, 2024).

Penelitian lain terkait mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam pengelolaan pertambangan di wilayah juga diperlukan. Temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih kurang efektif, disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada

masyarakat dan ketidakcukupan sumber daya. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi meliputi komunikasi kebijakan yang tidak optimal, disposisi implementor yang belum sepenuhnya mendukung, serta struktur birokrasi yang kurang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, perlu adanya perbaikan dalam aspek sosialisasi dan penguatan sumber daya serta struktur birokrasi.

Rekomendasi diperoleh untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan memperbaiki pelaksanaan kebijakan pengelolaan pertambangan di wilayah tersebut (Hapsari et al., 2024). Terkait implementasi kebijakan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh *Edward III* untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan perizinan usaha mikro dan kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 di Desa Punggul, Kabupaten Sidoarjo (Prasiwi et al., 2024). Temuan penelitian mengungkapkan adanya beberapa kendala signifikan dalam implementasi kebijakan tersebut. Dari segi indikator sumber daya manusia, pelaku usaha di desa ini masih kurang memahami aspek legalitas usaha, yang menghambat kepatuhan terhadap regulasi dan mempersulit proses perizinan. Selain itu, indikator struktur birokrasi menunjukkan bahwa dukungan dari pemerintah desa tidak memadai, sehingga pelaku usaha menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi dan fasilitas yang diperlukan. Akibatnya, usaha mikro dan kecil di Desa Punggul mengalami kesulitan dalam berkembang secara optimal. Penelitian ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai legalitas dan memperkuat dukungan birokrasi agar implementasi kebijakan dapat lebih efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Pentingnya menerapkan analisis implementasi kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Sidoarjo dapat ditinjau dari pandangan Edwards III (1980) dalam (Subarsono, 2005).

Menurut pandangan ini, terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Pertama, komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui secara jelas apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan dengan baik kepada kelompok sasaran (*target group*) untuk mengurangi kemungkinan distorsi dalam pelaksanaan. Kedua, sumber daya (Anam & Rodiyah, 2024). Meskipun kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, implementasi tidak akan berjalan efektif jika implementor kekurangan sumber daya yang diperlukan. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia.

Ketiga, disposisi. Disposisi merujuk pada watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Keempat, struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan memperhatikan keempat variabel ini, analisis implementasi kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Sidoarjo dapat dilakukan secara komprehensif untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan program dalam menurunkan prevalensi stunting di daerah tersebut.

Fokus penelitian ini mencakup empat aspek utama pertama, efektivitas komunikasi kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Sidoarjo dalam menyampaikan tujuan dan sasaran kepada kelompok sasaran kedua, ketersediaan dan distribusi sumber daya, baik manusia maupun non-manusia, dan dampaknya terhadap pelaksanaan program ketiga, disposisi implementor, termasuk komitmen, kejujuran, dan karakteristik pribadi, serta pengaruhnya terhadap keberhasilan kebijakan; keempat, peran struktur birokrasi dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai dan menganalisis

efektivitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi terkait dengan implementasi kebijakan. Manfaat penelitian ini termasuk memberikan wawasan tentang komunikasi kebijakan, kebutuhan sumber daya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi, serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sidoarjo.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan deskriptif dipilih untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai berbagai aspek pelaksanaan kebijakan, termasuk efektivitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi yang terlibat. Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih secara purposif, termasuk pejabat pemerintah daerah, pelaksana program, dan perwakilan masyarakat yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Sementara itu, data sekunder diambil dari dokumen kebijakan, laporan evaluasi program, dan data statistik resmi terkait angka stunting di Kabupaten Sidoarjo.

Teknik penentuan informan menggunakan pendekatan *purposive sampling*, dengan kriteria informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam implementasi program. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip saturasi data, di mana pengumpulan data dihentikan saat informasi yang diperoleh dianggap cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur untuk mendalami perspektif informan, lembar observasi untuk mencatat dinamika pelaksanaan program di lapangan, serta catatan dokumentasi untuk menganalisis kebijakan tertulis dan laporan terkait. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara tatap muka, direkam, dan ditranskrip untuk memastikan akurasi. Observasi dilakukan di lokasi pelaksanaan program untuk mengamati interaksi antara pemangku kepentingan. Studi dokumentasi difokuskan pada analisis kebijakan dan laporan resmi. Analisis data dilakukan melalui teknik kategorisasi tematik dan analisis deskriptif. Data yang diperoleh dikategorikan ke dalam tema-tema utama seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penalaran induktif digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola dan hubungan yang memengaruhi implementasi kebijakan. Temuan dianalisis secara triangulasi untuk memastikan validitas data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang tantangan dan keberhasilan dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, serta memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk peningkatan efektivitas kebijakan program stunting.

Hasil dan Pembahasan

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana implementor memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan. Dalam konteks Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Sidoarjo, tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan secara efektif kepada kelompok sasaran. Komunikasi yang baik akan memastikan bahwa pesan-pesan kebijakan diterima dengan tepat dan mengurangi kemungkinan terjadinya distorsi dalam implementasi. Dengan demikian, seluruh pihak yang terlibat memahami peran mereka dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan, secara rinci dapat dilihat dari gambar 1.



Gambar 1. Komunikasi Program Intervensi Kunci Penurunan Stunting (Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo)

Hasil menunjukkan bahwa untuk percepatan penurunan angka stunting, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi melalui berbagai strategi yang efektif. Salah satu pendekatan yang krusial adalah perubahan perilaku melalui penguatan Komunikasi Antar Pribadi (KAP), yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan perawatan anak sejak dini. Keterlibatan aktif organisasi masyarakat dan keagamaan menjadi penting dalam menyebarkan informasi ini secara luas dan mendalam ke berbagai lapisan masyarakat, memastikan bahwa pesan kesehatan gizi mencapai target yang tepat.

Selain itu, advokasi kebijakan merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa upaya pencegahan stunting terintegrasi dalam setiap level pemerintahan, mulai dari tingkat provinsi hingga desa. Ini melibatkan alokasi sumber daya manusia dan penganggaran yang memadai untuk mendukung implementasi program-program stunting secara efektif. Terbentuknya pokja (kelompok kerja) di setiap tingkatan pemerintahan sangat diperlukan untuk mengawal dan mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Koordinasi lintas sektor juga merupakan unsur krusial dalam upaya ini. Dengan membangun dan memelihara koordinasi yang baik antara sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sosial di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, akan memungkinkan penyelarasan program-program yang saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama dalam menurunkan prevalensi stunting.

Implementasi kebijakan yang konsisten dan komprehensif di semua tingkatan menjadi kunci dalam memastikan bahwa upaya-upaya ini tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan dalam menurunkan angka stunting di Indonesia. Untuk mencapai penurunan stunting yang signifikan, penting untuk memastikan ketersediaan layanan pencegahan yang menyeluruh serta terjadinya konvergensi di antara berbagai layanan kunci yang dibutuhkan oleh kelompok prioritas. Ini mencakup layanan kesehatan ibu dan anak yang komprehensif, termasuk pelayanan prenatal dan postnatal yang terjangkau dan berkualitas.

Konseling gizi terpadu juga menjadi hal yang penting, dimana ibu hamil dan ibu menyusui mendapatkan informasi yang tepat tentang pola makan sehat dan pilihan gizi terbaik untuk perkembangan anak. Selain itu, akses yang memadai terhadap sarana air bersih dan sanitasi yang aman sangat penting dalam memastikan kondisi lingkungan yang mendukung kesehatan. Perlindungan sosial dan jaminan kesehatan yang menyeluruh harus dijamin untuk mendukung keluarga dalam mengakses layanan kesehatan tanpa harus khawatir akan biaya. Pendidikan anak usia dini (PAUD) dan program kelas pengasuhan memberikan landasan penting bagi pembentukan pola asuh yang sehat dan penyediaan nutrisi yang memadai bagi anak-anak. Pemeriksaan kesehatan teratur bagi Pasangan Usia Subur (PUS) sangatlah penting untuk mendeteksi potensi masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak di masa depan.

Intervensi dilakukan melalui Puskesmas dan Posyandu dengan merevitalisasi sistem rujukan untuk kasus *weight faltering* dan stunting, memastikan bahwa setiap anak yang membutuhkan penanganan khusus dapat segera diidentifikasi dan dirujuk dengan tepat, baik ke Puskesmas maupun ke rumah sakit. Peningkatan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas akan mendukung terapi gizi yang lebih intensif, sementara perubahan aturan BPJS tentang stunting di rumah sakit akan memastikan layanan yang lebih baik bagi pasien. Merevitalisasi, melengkapi, dan mendigitalisasi alat ukur di 240 ribu Posyandu di seluruh Indonesia adalah langkah konkret untuk meningkatkan kualitas layanan di tingkat masyarakat, memastikan bahwa data yang terkumpul akurat dan dapat diakses dengan mudah untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Sinergi anggaran antar kementerian dan lembaga, serta penggunaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan indikator-target yang ditetapkan dalam Perpres 72/2021, akan memperkuat koordinasi dan efektivitas program secara keseluruhan. Dengan implementasi rencana ini secara komprehensif, diharapkan Indonesia dapat menghadapi tantangan stunting dengan lebih efektif, memberikan peluang yang lebih baik bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Langkah-langkah ini tidak hanya mengandalkan koordinasi yang baik antar lembaga dan kementerian, tetapi juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memprioritaskan kesehatan masyarakat sebagai investasi untuk masa depan bangsa.

Integrasi pelaksanaan intervensi gizi spesifik yang terarah pada berbagai kelompok sasaran merupakan langkah kunci dalam upaya meningkatkan kesehatan gizi di Indonesia. Dalam pendekatan ini, pengelompokan intervensi menjadi prioritas, penting, dan sesuai kondisi memungkinkan penyesuaian strategi yang tepat untuk setiap kelompok yang dituju. Bagi ibu hamil, fokus utama adalah pada pemberian makanan tambahan bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin, serta suplementasi tablet tambah darah untuk memastikan kecukupan zat besi yang penting selama kehamilan. Selain itu, pemeriksaan kehamilan, perlindungan dari malaria, dan pencegahan HIV menjadi bagian penting dari upaya untuk memastikan kesehatan ibu hamil secara menyeluruh. Untuk ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan, intervensi berfokus pada promosi dan konseling menyusui, serta pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) yang sesuai dengan kebutuhan gizi mereka. Manajemen terpadu balita sakit (MTBS), pemantauan pertumbuhan, dan suplementasi nutrisi seperti vitamin A, taburia, dan zinc untuk pengobatan diare juga menjadi prioritas dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah gizi pada kelompok ini. Menurut Soffa Sub Koordinator Kesga & Gizi Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo (2024), keberhasilan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo sangat dipengaruhi oleh sinergi lintas sektor, optimalisasi peran Puskesmas dan Posyandu, serta penguatan intervensi berbasis data.

Pendekatan yang terintegrasi melalui konseling gizi, promosi pola hidup sehat, dan penyediaan makanan tambahan untuk kelompok rentan, seperti ibu hamil dan balita, telah berkontribusi pada pencapaian target penurunan prevalensi stunting. Digitalisasi alat ukur di Posyandu dan peningkatan kapasitas kader kesehatan menjadi strategi utama untuk meningkatkan efektivitas program, sehingga memungkinkan pelaksanaan intervensi yang lebih tepat sasaran. Remaja dan wanita usia subur mendapat perhatian khusus melalui suplementasi tablet tambah darah untuk memenuhi kebutuhan zat besi mereka yang krusial dalam masa pertumbuhan dan reproduksi.

Sedangkan anak usia 24-59 bulan, yang juga merupakan kelompok rentan, membutuhkan penanganan gizi buruk akut, pemulihan melalui pemberian makanan tambahan, dan suplementasi zat gizi esensial untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan mereka. Intervensi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan status gizi

secara langsung, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap kelompok sasaran dapat mengakses layanan kesehatan gizi yang tepat dan bermanfaat sesuai dengan kondisi mereka. Melalui integrasi yang kokoh dari berbagai program intervensi gizi ini, diharapkan dapat tercapai perbaikan yang signifikan dalam kesehatan gizi masyarakat, membawa dampak positif jangka panjang bagi pertumbuhan dan perkembangan seluruh generasi di Indonesia.

3. Disposisi

Disposisi mengacu pada watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Dalam konteks Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Sidoarjo, implementor harus memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan kebijakan dengan integritas dan transparansi. Disposisi yang baik akan memotivasi implementor untuk bekerja lebih keras dan lebih efektif dalam mencapai target penurunan stunting, secara rinci pada Gambar 3.



Gambar 3. Disposisi Regulasi Program Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten (Sumber: Sidoarjo, Diolah Penulis)

Program gizi yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk mengatasi masalah gizi yang beragam di berbagai kelompok usia dan kondisi. Salah satu kegiatan utama adalah pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang ditargetkan untuk ibu hamil dan busui yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK), balita dengan status gizi kurang, serta anak sekolah yang membutuhkan asupan tambahan. PMT ini dirancang untuk memastikan bahwa kelompok rentan mendapatkan nutrisi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan program percepatan penurunan stunting.

Selain PMT, program juga mencakup pemberian nutrisi tambahan berupa makanan dan minuman bagi ibu hamil dan busui yang mengalami KEK, balita, dan anak sekolah yang menghadapi masalah gizi. Hal ini bertujuan untuk memastikan kecukupan gizi yang diperlukan untuk mendukung kesehatan dan perkembangan optimal mereka. Di sisi lain, program juga mengimplementasikan pemberian MP-ASI lokal bagi bayi dengan Gakin (Gizi Akut Kronis) untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan makanan pendamping ASI yang kaya akan nutrisi. Suplementasi zat gizi seperti tablet besi bagi ibu hamil dan remaja putri, serta vitamin A bagi bayi dan busui juga menjadi bagian penting dari upaya ini. Selain dari aspek pemberian nutrisi, edukasi kepada petugas kesehatan, tenaga kesehatan, dan kader tentang pentingnya Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) serta ASI Eksklusif merupakan prioritas dalam memastikan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mendukung praktik gizi yang baik di masyarakat. Petugas kesehatan juga dilatih untuk mendeteksi dini dan menangani ibu hamil dengan KEK, serta melakukan pemantauan pertumbuhan anak secara rutin. Program ini juga mencakup pendirian Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) di desa dan pojok laktasi di fasilitas umum dan perusahaan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung praktik ASI eksklusif.

Pelaksanaan Pos Gizi di desa untuk balita gizi kurang, konselor menyusui dan PMBA bagi tenaga kesehatan, kader, dan tokoh masyarakat juga menjadi kegiatan rutin untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada ibu dan anak. Selain itu, pendampingan bagi ibu hamil dengan risiko tinggi seperti Resti, KEK, dan anemia, serta bayi dengan risiko BBLR, prematur, dan stunting oleh kader juga merupakan langkah penting dalam mendukung kesehatan gizi di tingkat komunitas. Program juga melibatkan TP3 Kesga & Gizi dalam monitoring rawan gizi dan pelacakan gizi buruk lintas program dan sektor, serta pelaksanaan bulan Timbang Serentak untuk deteksi dini balita stunting. Penggunaan Pita LiLA untuk deteksi dini masalah gizi, serta lintas program Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) dan desa ODF, juga menjadi bagian dari strategi yang holistik dalam menjaga kesehatan masyarakat.

Pemberian obat cacing dan imunisasi lengkap bagi bayi, balita, ibu hamil, dan anak sekolah juga turut mendukung upaya pencegahan dan penanganan penyakit yang berhubungan dengan masalah gizi. Heri Susanto, Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting di wilayahnya. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kebijakan yang ada, tetapi juga pada koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat. Melalui berbagai inisiatif ini, Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur kesehatan gizi dan meningkatkan aksesibilitas layanan gizi yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masalah gizi dapat diminimalkan dan kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan secara keseluruhan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang efisien dan efektif sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam program ini, struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan harus mampu mendukung koordinasi dan kerjasama antar lembaga. Struktur yang jelas dan prosedur yang efisien akan memastikan bahwa semua tahapan implementasi berjalan lancar dan tepat waktu, sehingga tujuan penurunan stunting dapat tercapai. Kabupaten Sidoarjo telah mengambil langkah-langkah strategis yang komprehensif dalam menanggulangi masalah stunting, sebuah tantangan serius dalam kesehatan masyarakat yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Dalam mendukung visi ini, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2022 memberikan landasan hukum yang kuat bagi Dinas Kesehatan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dibutuhkan. Salah satu fokus utama dari program tersebut adalah menetapkan target ambisius untuk menurunkan angka stunting hingga 14% pada tahun 2024. Target ini mencerminkan komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Kabupaten Sidoarjo melalui upaya-upaya yang terkoordinasi dengan baik antar berbagai sektor terkait. Program Konsolidasi Bangsa Kencana dan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting menjadi tonggak penting dalam strategi ini, mengintegrasikan peran pemerintah daerah, lembaga kesehatan, pendidikan, dan partisipasi aktif masyarakat.

Upaya sosialisasi yang intens dilakukan oleh Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting. Sosialisasi ini melibatkan kader kesehatan dari berbagai kecamatan, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan mereka dalam mendukung program-program gizi yang berkelanjutan. Rapat koordinasi seperti Audit Kasus Stunting Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Sidoarjo merupakan bagian dari strategi evaluasi untuk memantau kemajuan program secara berkala. Hal ini memastikan bahwa program-program yang dijalankan tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga

memberikan hasil yang dapat diukur dan dapat ditingkatkan keefektifannya. Bukti konkret dari upaya ini terlihat dari penurunan signifikan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo, dari 16,1% pada tahun 2022 menjadi 8,4% pada tahun 2023.

Hasil ini mencerminkan kesuksesan dari strategi yang diterapkan dalam mengatasi masalah gizi ini. Dengan berbagai langkah seperti pendampingan khusus bagi ibu hamil dan bayi berisiko tinggi, serta implementasi program pemantauan gizi secara menyeluruh, Kabupaten Sidoarjo menunjukkan komitmen yang nyata dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak secara optimal. Menurut Kepala BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo Susanto (2024), dalam rangka menanggulangi masalah stunting secara efektif, struktur birokrasi yang terkoordinasi dengan baik dan efisien sangat penting. Program percepatan penurunan stunting yang diterapkan di Kabupaten Sidoarjo memerlukan kerjasama lintas sektor yang solid, serta keterlibatan aktif berbagai lembaga dan masyarakat.

Dengan adanya regulasi yang jelas dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, BAPPEDA berkomitmen untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan tidak hanya terkoordinasi dengan baik, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan angka stunting. Upaya ini mencerminkan peran penting dari perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang berbasis data dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian, Kabupaten Sidoarjo tidak hanya berupaya untuk mengurangi angka stunting, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan melalui integrasi program gizi yang holistik dan berkelanjutan. Melalui upaya bersama dari semua pihak terkait, diharapkan Kabupaten Sidoarjo dapat mencapai target ambisinya dan menjadi contoh keberhasilan dalam penanganan masalah gizi di tingkat lokal.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan program percepatan penurunan stunting yang terintegrasi di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan gizi dengan pendekatan yang holistik. Dengan menetapkan target ambisius untuk menurunkan angka stunting hingga 14% pada tahun 2024, Kabupaten Sidoarjo mengimplementasikan program-program seperti Konsolidasi Bangga Kencana dan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting, serta melakukan sosialisasi intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Evaluasi berkala melalui rapat koordinasi dan penurunan signifikan angka stunting dari 16,1% pada tahun 2022 menjadi 8,4% pada tahun 2023 menjadi bukti keberhasilan dari pendekatan ini. Dengan mengintegrasikan berbagai sektor dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, Kabupaten Sidoarjo berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak secara optimal, menunjukkan bahwa strategi ini efektif dalam mengatasi masalah gizi di tingkat lokal. Dengan memperhatikan keempat indikator ini, analisis implementasi kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Sidoarjo dapat dilakukan secara komprehensif, memastikan bahwa semua aspek yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan diperhatikan dan ditangani dengan baik.

Daftar Pustaka

Abdussamad, J., Hurudji, A., & Putri, W. (2022). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata Di Desa Bototonuo Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 9(2), 157-178.

- Affrian, R. (2024). Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh). *Jurnal Niara*, 16(3), 520-524.
- Anam, K., & Rodiyah, I. (2024). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 5(1), 199-213.
- Anita, A., Aprina, A., Sudarmi, S., Rusyantia, A., Pranajaya, P., & Astuti, T. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Swasembada Gizi dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Lampung Selatan. *MAHESA: Malahayati Health Student Journal*, 4(3), 1007-1025.
- Ardhana, R., & Hertati, D. (2021). Implementasi Kebijakan Penataan Minimarket di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Governansi*, 7(2), 131-142.
- Arini, D., Chabibah, N., & Agustin, M. A. (2020). Analisa Determinan Sosial Demografi Ibu terhadap Kejadian Stunting pada Anak Usia Toddler di Wilayah Puskesmas Kenjeran Surabaya. *Journal Of Health Science (Jurnal Ilmu Kesehatan)*, 5(1), 1-10.
- Darmansyah, E., & Yusran, R. (2024). Implementasi Kebijakan Kampanye Perubahan Perilaku dalam Upaya Penurunan Stunting di Puskesmas Danau Kerinci Barat. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(1), 10-10.
- Hapsari, N., Waris, I., & Alamasyah, N. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Minerba di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore Kota Palu. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 1(5), 240-253.
- Hermawan, K. T., & Pusparani, I. G. (2023). The Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kota Cirebon. *Jurnal Borneo Akcaya*, 9(2), 233-248.
- Iqbal, M. (2022). Evaluasi Program Zinc Sebagai Intervensi Gizi Khusus Dalam Pencegahan Stunting Pada Program Gerakan 1000 Hari Pertama Hidup (HPK) di Puskesmas Halmahera Kota Semarang. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo*, 8(2), 309-317.
- Krosby, S. S., Rahmi, S. A., & Mintasrihardi, M. (2024). Bahas Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kota Matarama Indonesia. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 10(1), 29-43.
- Larasati, N., & Susilo, A. T. H. (2024). Implementasi Agenda Internasional Stunting di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Malang Kecamatan Tajinan. *Jurnal Sehat Indonesia (JUSINDO)*, 6(01), 293-307.
- Mamulaty, A., Rengifurwarin, Z. A., & Normawati, N. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Desa Wamsisi Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 587-601.
- Maulana, M. A., & Santosa, S. H. (2020). Explaining Legal Implications: Ownership Analysis Of Intellectual Property Rights On Cryptokitties Platforms. *Future Generation Computer Systems*, 102, 259-77.
- Mitra, M., Nurlisis, N., & Rany, N. (2022). Edukasi Online tentang Persiapan Laktasi Ketika Hamil untuk Keberhasilan ASI eksklusif dan Pencegahan Stunting. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 475-481.
- Nurizal, I., Dermawanaryo, A., Ilahi, M. R. S., Widari, D. K., Andayani, N. L. W., Rahmatun, F., Herlinda, T., & Ferinadivia, D. (2022). Optimalisasi Program Pencegahan Stunting oleh KKN-T UNRAM Bersama Puskesmas Kecamatan Sambelia dan para Kader Posyandu di Desa Sambelia Kecamatan Sambelia. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5(3), 157-161.

- Prasiwi, S. D., Mursyidah, L., & Sutanto, S. H. (2024). Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi Usaha Mikro dan Kecil Topi di Desa Punggul, Kabupaten Sidoarjo). *CAKRAWALA*, 18(1), 59-73.
- Purwati, N., Syukron, A., Widodo, P., & Kuwvaamri, S. (2024). Implementasi Aplikasi Peringatan Dini Stunting Balita Data pada Posyandu Desa Pejengkolan. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 99-106.